

Judul : Mekanisme lewat PBB dinilai lebih tepat, senayan dukung pemerintah tunda kirim pasukan ke Gaza
Tanggal : Rabu, 25 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Mekanisme Lewat PBB Dinilai Lebih Tepat

Senayan Dukung Pemerintah Tunda Kirim Pasukan Ke Gaza

Senayan mendukung langkah Pemerintah Indonesia menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai lebih tepat, terukur, dan memiliki legitimasi internasional yang kuat.

ANGGOTA Komisi II DPR Ahmad Heryawan mengatakan, situasi di Gaza saat ini masih sangat dinamis dan penuh risiko, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis. Utamanya yang menyangkut keselamatan personel serta kedaulatan negara lain. "Keputusan Pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak," puji Aher sapaan akrabnya, Selasa (24/3/2026).

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Pemerintah menunda pengiriman 8 ribu pasukan yang akan menjalani misi perdamaian bersama Pasukan Stabilisasi Nasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. "Semua di-hold," kata Prasetyo usai menggelar rapat koor-

dinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (18/3/2026).

Penundaan pengiriman pasukan salah satunya karena eskalasi konflik di Timur Tengah yang meningkat. Pemerintah Indonesia, lanjut Aher, harus memastikan setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB.

Kata dia, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian global. Oleh karena itu, mekanisme PBB menjadi jalur paling tepat agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional.

"Juga pentingnya peran diplo-



Ahmad Heryawan

masi Indonesia dalam mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian konflik secara damai di kawasan tersebut," kata mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) ini.

Indonesia, lanjutnya, harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Karena itu, peran Indonesia tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan

kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional.

Aher berharap, Pemerintah Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan negara-negara sahabat dan lembaga internasional. Tujuannya untuk memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi perdamaian di Gaza.

Karena itu, Indonesia bisa segera mengevaluasi keberadaan di Board of Peace (BOP) jika tujuannya tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina. Dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Juga menjaga persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang sensitif.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menambahkan, penundaan pengiriman pasukan dari Indonesia untuk misi perdamaian bersama ISF di Gaza harus dilakukan secara hati-hati. Karena hal tersebut merupakan bagian dari strategi agar kontribusi In-

donesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan maupun stabilitas regional.

"Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen," kata Dave dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Oleh karena itu, Dave menekankan keputusan Pemerintah yang menunda pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza perlu dipahami dalam bingkai yang lebih luas. Mengingat dalam setiap langkah harus mempertimbangkan situasi geopolitik terkini, seperti dinamika keamanan di lapangan kesiapan logistik, dan diplomasi.

Meskipun dalam kerangka konstitusi dan amanat nasional, kata dia, Indonesia menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan. "Sehingga ketika kondisi memungkinkan, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi terciptanya keamanan dan stabilitas di Gaza," tutup politikus Golkar ini. ■ TIF